



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Woha-Bima Nusa Tenggara Barat
Telepon (0374) 43718, Faximale (0374) 43300

PENGUMUMAN **NOMOR : 871/104/07.2/2024**

TENTANG **SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA** **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2024**

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 Tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bima membuka seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk mengisi kebutuhan formasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Register untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 Tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. Tahun 2024 Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Register (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

Seluruh pelamar wajib membaca dan mempedomani ketentuan sesuai dasar hukum di atas.

B. KEBUTUHAN FORMASI DAN JENIS JABATAN

1. Jumlah kebutuhan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024 sejumlah 2.367 (dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh) formasi, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Formasi
1.	Jabatan Fungsional Guru	600
2.	Jabatan Fungsional Kesehatan	650
3.	Jabatan Tenaga Teknis	1.117
Jumlah		2.367

2. Rincian formasi jabatan, lokasi formasi/unit penempatan, kualifikasi pendidikan, jenis formasi, dan jumlah alokasi formasi sebagaimana tercantum pada **lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

C. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- a) Warga Negara Indonesia (WNI);
- b) Batas Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
- c) Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- d) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- f) Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

- h) Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, **(ketentuan sertifikasi keahlian tertentu dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional);**
- j) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- k) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- l) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- m) Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK.
- n) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT pengangkatan sebagai PPPK;
- o) Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
- p) Penyandang disabilitas dapat melamar jabatan pada formasi kebutuhan khusus disabilitas dan formasi kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
- q) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

2. **PERSYARATAN KHUSUS**

- a) Pelamar pada Jabatan Fungsional Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan/akademik dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat Pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
- b) Pelamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR kecuali Jabatan tertentu yang tidak mensyaratkan STR dengan merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Register untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Register (STR) dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- c) Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai bagi Pelamar pada jabatan fungsional tenaga teknis sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - d) Pelamar Penyandang disabilitas selain memenuhi persyaratan umum di atas, harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
 - e) Pelamar yang berstatus PPPK dalam hal akan melamar pada lowongan jenis pengadaan PPPK selain memenuhi persyaratan umum di atas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun;
 - b. telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
 - f) Pelamar yang berstatus PPPK yang akan melamar pada formasi PPPK dapat mengajukan persetujuan PPK atau Pyb melalui BKD dan DIKLAT Kab. Bima dengan melampirkan surat permohonan dan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah **paling lambat tanggal 15 Oktober 2024.**

3. **KETENTUAN/MEKANISME SELEKSI**

a. Mekanisme Seleksi Jabatan Tenaga Teknis

- 1) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan :
 - a) Jabatan Fungsional; dan
 - b) Jabatan Pelaksana.
- 2) Kebutuhan formasi untuk Jabatan Tenaga Teknis dimaksud diperuntukkan bagi pelamar :
 - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II); atau
 - b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non-ASN).
- 3) Eks THK-II dimaksud adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah.

- 4) Tenaga Non-ASN dimaksud terdiri atas :
 - a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - b. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- 5) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2) hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- 6) Kebutuhan formasi sebagaimana pada angka 1) dapat dilamar oleh Penyandang disabilitas dengan ketentuan selain memenuhi persyaratan umum di atas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
- 7) Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
 - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 8) Pengalaman/masa kerja sebagaimana dimaksud pada angka 7) dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- 9) Bagi pelamar yang melamar pada Formasi Jabatan Tenaga Teknis dan bekerja pada unit kerja UPTD, Puskesmas, Korwil Dikbudpora, Satuan Pendidikan, RSUD Bima, RSUD Sondosia, dan Perangkat Daerah, pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang di tandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang membawahi unit kerja dimaksud.
- 10) Bagi pelamar yang bekerja di unit kerja yang dipimpin oleh pejabat Administrator atau Eselon III (Kantor Camat), pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang di tandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bima dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Camat yang dibubuhi meterai 10.000,-;
 - b. SK Pengangkatan sebagai Tenaga Non-ASN;
 - c. Bukti Absensi minimal 2 (dua) tahun terakhir.

b. Mekanisme Seleksi Jabatan Fungsional Guru

- 1) Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk **Jabatan Fungsional Guru** di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi :
 - a) Pelamar prioritas;
 - b) Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II);
 - c) Guru Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non-ASN) di instansi daerah; atau
 - d) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 2) Pelamar prioritas pada Jabatan Fungsional Guru adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- 3) Guru Eks THK-II dimaksud adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar pada instansi pemerintah;
- 4) Guru Non-ASN di instansi daerah terdiri atas :
 - a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
 - b) Guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
- 5) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a, b, dan c hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar;
- 6) Dalam hal terdapat pelamar prioritas berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi pemerintah daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan;
- 7) Pelamar pada seleksi Jabatan Fungsional Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan/akademik dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat Pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
- 8) Pelamar pada Jabatan Fungsional Guru yang berstatus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;

- b) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
- c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

c. Mekanisme Seleksi Jabatan Fungsional Kesehatan

- 1) Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Jabatan Fungsional Kesehatan tahun anggaran 2024 terdiri dari :
 - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II); atau
 - b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non-ASN)
- 2) Eks THK-II dimaksud adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
- 3) Tenaga Non-ASN dimaksud terdiri atas :
 - a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 - b) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
- 4) Dalam hal terdapat kebutuhan pada JF Kesehatan formasi Bidan kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut dapat dilamar oleh pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023;
- 5) Pelamar D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada JF Kesehatan Bidan kategori keahlian;
- 6) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
- 7) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5) hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan PPPK tahun 2023;
- 8) Pelamar pada seleksi Jabatan Fungsional Kesehatan tahun anggaran 2024 Wajib memiliki kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan internship sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran kecuali Jabatan tertentu yang tidak mensyaratkan STR dengan merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Register untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Register (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

- 9) Kebutuhan formasi JF Kesehatan dapat dilamar oleh Penyandang disabilitas dengan ketentuan selain memenuhi persyaratan umum di atas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
- 10) Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - b) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 11) Pengalaman/masa kerja pelamar pada JF Kesehatan tahun anggaran 2024 dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut :
 - a) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
 - d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.

4. **KETENTUAN PENGGUNAAN METERAI**

- a) Pendaftaran seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 di perkenankan untuk menggunakan meterai elektronik (e-meterai) maupun meterai konvensional (meterai tempel) pada dokumen unggahan sesuai persyaratan;
- b) Panitia seleksi instansi akan melakukan verifikasi keabsahan validitas meterai yang dipergunakan oleh pelamar pada dokumen persyaratan administrasi;
- c) Calon pelamar agar tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi.

D. JADWAL DAN TATA CARA PELAMARAN/PENDAFTARAN

1. JADWAL PELAMARAN/PENDAFTARAN

- a) **Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks THK-II dan Tanaga Non-ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN sebagai berikut :**

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 Oktober s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 Oktober s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 November s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 November s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 November s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 November s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 November s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 Desember s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 Desember s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 Desember s.d. 31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 Januari s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 Februari s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

- b) **Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Tanaga Non-ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi JF Guru di Instansi Daerah) sebagai berikut :**

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 November s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 Februari 2025 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 Februari s.d. 21 Februari 2025

6	Jawab Sanggah	20 Februari s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 Februari s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 Maret s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 Maret s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 April s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 Mei s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 Juni s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 Juli s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

2. **TATA CARA PENDAFTARAN**

- 1) Pelamaran/pendaftaran pada seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2024 dilakukan secara daring melalui portal SSCASN BKN;
- 2) Tata cara pelamaran/pendaftaran seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2024 secara daring/*online* dapat dilihat dan diunduh melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 3) Pelamar agar membaca dengan teliti dan mengikuti petunjuk setiap tahapan proses pendaftaran yang terdapat di portal SSCASN dan jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pelamar bukan menjadi tanggung jawab Panitia;
- 4) Pelamar melakukan pendaftaran secara daring/*online* pada portal resmi SSCASN BKN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
- 5) Pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring/*online* terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
- 6) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN pada tahun anggaran yang sama;
- 7) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
- 8) Dalam hal pelamar diketahui melamar :
 - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9) Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca dengan jelas dan tidak terpotong. Kesalahan pelamar dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 10) Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN tahun anggaran 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- 11) Pada laman daftar tampilan SSCASN, Pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data ijazah. Proses pendaftaran menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, pastikan bahwa anda mengisi data tersebut dengan benar;
- 12) INGAT DAN CATAT dengan baik Akun SSCASN 2024 dan Password beserta pertanyaan keamanan masing-masing pelamar, karena akan digunakan untuk Login selanjutnya.

3. **DOKUMEN/BERKAS PENDAFTARAN YANG WAJIB DIUNGGAH OLEH PELAMAR**

- a) Pelamar pada seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 wajib mengunggah dokumen asli sesuai persyaratan pada saat mendaftar pada SSCASN BKN;
- b) Dokumen pendaftaran yang wajib diunggah oleh pelamar dalam bentuk scan berwarna sebagai berikut :
 - 1) Pas Foto terbaru mengenakan pakaian formal dengan latar belakang merah;
 - 2) Swafoto dengan Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Informasi Akun;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
 - 4) Surat Lamaran asli ditujukan kepada Bupati Bima di Bima yang sudah ditanda tangani dan dibubuhi/ditempel meterai 10.000,-, format surat lamaran sebagaimana pada lampiran II penumuman ini;
 - 5) Surat Pernyataan 5 (lima) point asli yang sudah ditanda tangani dan dibubuhi/ditempel meterai 10.000,-, format surat pernyataan sebagaimana pada lampiran III pengumuman ini;
 - 6) Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun dan dibubuhi/ditempel meterai 10.000,-, format surat lamaran sebagaimana pada lampiran IV pengumuman ini;
 - 7) Surat Keterangan Bukti Pengalaman aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir aktif bekerja secara terus menerus dan dibubuhi/ditempel meterai 10.000,-, format surat lamaran sebagaimana pada lampiran V pengumuman ini;
 - 8) Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan;
 - 9) Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan;
 - 10) Ijazah Profesi asli bagi Apoteker, Ners, Dokter dan Dokter Spesialis;
 - 11) Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku, bukan STR Internship dan Bukan Surat Keterangan bagi Pelamar pada Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan yang mensyaratkan

Surat Tanda Registrasi STR);

- 12) Sertifikat Pendidik yang terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta linear dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik.

Catatan : Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali, mohon diperhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti, karena sistem tidak menerima unggah ulang dokumen.

4. **HAL - HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN PADA SAAT PENDAFTARAN**

- 1) Ijazah Sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti Yudisium **TIDAK BERLAKU** untuk digunakan dalam proses pendaftaran;
- 2) Pada saat pendaftaran secara online, Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan yang muncul di laman pendaftaran online tersebut;
- 3) Pelamar wajib memiliki **Surat Elektronik (e-mail)** yang masih aktif/berlaku;
- 4) Untuk melakukan pendaftaran secara daring/*online*, Pelamar wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
- 5) Apabila Pelamar tidak bisa mendaftar terkait kendala terhadap data NIK dan Nomor KK, Pelamar agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar;
- 6) Semua informasi/data yang diisikan oleh pelamar dalam formulir pendaftaran berdasarkan **dokumen asli** secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila informasi/data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

E. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri atas 2 tahap, yaitu :
 - a) Seleksi Administrasi; dan
 - b) Seleksi Kompetensi, meliputi :
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural.
2. Seleksi Administrasi
 - a) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
 - b) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN;
 - c) Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka;
 - d) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;

- e) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi, mengikuti tahap selanjutnya yaitu seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK;
- f) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kelender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- g) Sanggahan disampaikan/diajukan secara daring/online melalui akun masing-masing pelamar pada portal SSCASN;
- h) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- i) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- j) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
- k) Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

3. Seleksi Kompetensi

- a) Seleksi kompetensi dilakukan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- b) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
- c) Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
- d) Penilaian integritas dan moralitas dilaksanakan dengan wawancara;
- e) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- f) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan social kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
- g) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;
- h) Seleksi kompetensi teknis manajerial, dan social kultural bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
- i) Wawancara bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
- j) Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian :
 - 1) seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

- k) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian :
 - 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan social kultural; dan
 - 3) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- l) Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf j) dikecualikan bagi jabatan Pengelola Umum Operasional;
- m) Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan Pengelola Umum Operasional adalah 100 (seratus) butir soal, dengan rincian :
 - 1) seleksi kompetensi teknis sejumlah 45 (empat puluh lima) butir soal;
 - 2) seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- n) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara bagi jabatan Pengelola Umum Operasional adalah 445 (empat ratus empat puluh lima), dengan rincian :
 - 1) 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan social kultural; dan
 - 3) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- o) Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas pada seleksi pengadaan JF Guru menggunakan hasil seleksi tahun 2021;
- p) Dalam hal pelamar pada kebutuhan JF Guru memiliki Sertifikat Pendidik yang terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta linear dengan jabatan yang dilamar, mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;

F. PENGOLAHAN HASIL AKHIR SELEKSI / PENENTUAN KELULUSAN

1. Jabatan Tenaga Teknis

- a) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
- b) Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan persyaratan pada jabatan yang dilamar;
- c) Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
 - 1) Eks THK-II;
 - 2) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
 - 3) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

- d) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diberlakukan ketentuan sesuai pada angka 3) diatas, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud sesuai pada angka 3) diatas;

2. **Jabatan Fungsional Guru**

- a) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- b) Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada Huruf a diberlakukan secara berurutan bagi:
 - 1) pelamar prioritas;
 - 2) guru eks THK-II;
 - 3) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
 - 4) guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; dan
 - 5) lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c) Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada Huruf b nomor 1 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) guru eks THK-II;
 - 2) guru non-ASN;
 - 3) lulusan PPG; dan
 - 4) guru swasta.
- d) Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- e) Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf d) diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri.

3. **Jabatan Fungsional Kesehatan**

- a) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- b) Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a) secara berurutan bagi:
 - 1) eks THK-II;
 - 2) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - 3) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- c) Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada kebutuhan JF bidan kategori keahlian diberlakukan secara berurutan bagi:
 - 1) pelamar D-IV Bidan Pendidik;
 - 2) eks THK-II;

- 3) pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - 4) pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- d) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah huruf b dan huruf c diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
 - e) Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
 - f) Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf e diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri.

G. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I : Rincian Kebutuhan Formasi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Format Surat Lamaran
3. Lampiran III : Format Surat Pernyataan 5 (lima) poin;
4. Lampiran IV : Format Surat Keterangan Pengalaman Bekerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun
5. Lampiran V : Format Surat Keterangan Aktif Bekerja pada Instansi Pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bima tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran dalam bentuk apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dan Peserta agar tidak mempercayai pihak-pihak tertentu untuk mempermudah kelulusan;
2. Panitia Seleksi pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos;
3. Semua berkas/dokumen pelamaran diunggah pada portal resmi SSCASN BKN pada saat pendaftaran;
4. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bima berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Bagi Pelamar yang tidak lengkap salah satu kelengkapan/dokumen dalam pendaftaran (diunggah), maka Panitia berhak menggugurkan pelamar pada proses seleksi administrasi;

7. Pengumuman dan Informasi resmi terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat melalui website BKD dan DIKLAT Kabupaten Bima : <https://www.bkd.bimakab.go.id>, website Pemerintah Kabupaten Bima : <https://www.bimakab.go.id>, portal resmi BKN pada laman : <https://sscasn.bkn.go.id>, serta media sosial resmi BKD dan Diklat Kabupaten Bima : <https://www.instagram.com/bkddiklatkabupatenbima>
8. Hal-hal yang belum dimuat dalam pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal : 1 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH

**SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
KABUPATEN BIMA TAHUN 2024,**



LAMPIRAN I
PENGUMUMAN
TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 871/104/07.2/2024
TANGGAL : 1 Oktober 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2024

I KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN		JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
1	GURU AGAMA ISLAM	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	1
2	GURU AGAMA KATOLIK	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	1
3	GURU BAHASA INDONESIA	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	1
4	GURU BAHASA INGGRIS	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	1
5	GURU BIMBINGAN KONSELING	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	37
6	GURU IPA	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	1
7	GURU IPS	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	1
8	GURU KELAS-SD	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	201
9	GURU KELAS-TK	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	1
10	GURU MATEMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	1
11	GURU PENJASORKES	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	127
12	GURU PPKN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	27
13	GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	54
14	GURU SENI BUDAYA	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	60
15	GURU TIK	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAMHRAGA	KHUSUS	86
JUMLAH					600

II KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO	KHUSUS	2
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA	KHUSUS	2
4	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	2
5	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	3
6	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU	KHUSUS	2
7	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALIBELO	KHUSUS	2
8	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	1
9	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALI	KHUSUS	1
10	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BELO	KHUSUS	2
11	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI	KHUSUS	2
12	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU	KHUSUS	2
13	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOLO	KHUSUS	1
14	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOHA	KHUSUS	1
15	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO	KHUSUS	1
16	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	1
17	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO	KHUSUS	1
18	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA ADMINISTRASI KESEHATAN	KHUSUS	3
19	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA	KHUSUS	2
20	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BELO	KHUSUS	1
21	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	1
22	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALI	KHUSUS	1
23	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO	KHUSUS	1
24	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	1
25	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	1
26	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOLO	KHUSUS	1
27	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	2
28	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI FARMASI	KHUSUS	2
29	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA	KHUSUS	1
30	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU	KHUSUS	2
31	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	1
32	Apoteker Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA INSTALASI FARMASI	KHUSUS	7
33	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN UPT INSTALASI FARMASI	KHUSUS	6
34	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA INSTALASI FARMASI	KHUSUS	5
35	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
36	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU	KHUSUS	1
37	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO	KHUSUS	1
38	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO	KHUSUS	1
39	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI FARMASI	KHUSUS	3
40	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	2
41	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	1
42	Asisten Apoteker Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	2
43	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
44	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI	KHUSUS	1
45	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA PERAWATAN NIFAS	KHUSUS	4
46	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI KEPERAWATAN ANAK	KHUSUS	1
47	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	2
48	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALIBELO	KHUSUS	2
49	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA RUANG PERAWATAN NIFAS	KHUSUS	3
50	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOHA	KHUSUS	2
51	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO	KHUSUS	2
52	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU	KHUSUS	3
53	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI	KHUSUS	1
54	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
55	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	2
56	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA RUANG BERSALIN /VK	KHUSUS	3
57	Bidan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	2
58	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI RAWAT INAP KELAS 2 DAN KELAS 3	KHUSUS	2
59	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA NONTOTERA	KHUSUS	1
60	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU	KHUSUS	5
61	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA POLIKLINIK POLI KANDUNGAN	KHUSUS	1
62	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO DORIDUNGGA	KHUSUS	1
63	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOLO	KHUSUS	2
64	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA PUSTU KAWINDA TOI	KHUSUS	1
65	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BELO	KHUSUS	3
66	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA SONDO	KHUSUS	2
67	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA PUSTU OI BURA	KHUSUS	1
68	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA	KHUSUS	10
69	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA PUSTU MANDALA	KHUSUS	1
70	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	4
71	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU PUSTU KALODU	KHUSUS	1
72	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	2
73	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI	KHUSUS	5
74	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU BIDAN DESA KABORO	KHUSUS	2
75	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA POLIKLINIK POLI ANAK	KHUSUS	2
76	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALI	KHUSUS	6
77	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOHA	KHUSUS	5
78	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA PUSTU LABUHAN KENANGA	KHUSUS	1
79	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR POLINDES DESA OI SARO	KHUSUS	1
80	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA PUSTU OI PANIHI	KHUSUS	1
81	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR POLINDES DESA TALOKO	KHUSUS	1

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
82	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	12
83	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI PUSTU OI TUI	KHUSUS	1
84	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO	KHUSUS	7
85	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALIBELO	KHUSUS	1
86	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	3
87	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA	KHUSUS	10
88	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR POLINDES DESA PIONG	KHUSUS	1
89	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA POLIKLINIK POLI PENYAKIT DALAM	KHUSUS	1
90	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU BIDAN DESA KUTA	KHUSUS	2
91	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	11
92	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	7
93	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR POLINDES DESA BORO	KHUSUS	1
94	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI	KHUSUS	11
95	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA PUSTU TADEWA	KHUSUS	1
96	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA PUSTU KAWINDA NAE	KHUSUS	1
97	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA IGD PONEK	KHUSUS	3
98	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU	KHUSUS	3
99	Bidan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA PERAWATAN NIFAS	KHUSUS	2
100	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	1
101	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO	KHUSUS	1
102	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA	KHUSUS	1
103	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
104	Fisioterapis Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA FISIOTERAPI	KHUSUS	1
105	Fisioterapis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA FISIOTERAPI	KHUSUS	2
106	Nutrisisionis Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	1
107	Nutrisisionis Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	3
108	Nutrisisionis Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
109	Nutrisisionis Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	1
110	Nutrisisionis Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOHA	KHUSUS	1
111	Nutrisisionis Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI GIZI	KHUSUS	2
112	Nutrisisionis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	1
113	Nutrisisionis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI GIZI	KHUSUS	2
114	Nutrisisionis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
115	Nutrisionis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	1
116	Nutrisionis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA INSTALLASI GIZI.NEW	KHUSUS	5
117	Nutrisionis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO	KHUSUS	2
118	Nutrisionis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	1
119	Nutrisionis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU	KHUSUS	2
120	Penata Anestesi Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA INSTALASI BEDAH SENTRAL IBS	KHUSUS	2
121	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU	KHUSUS	10
122	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALIBELO	KHUSUS	6
123	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI RAWAT INAP KELAS 1	KHUSUS	4
124	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA	KHUSUS	3
125	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	6
126	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU	KHUSUS	4
127	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOHA	KHUSUS	5
128	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALI	KHUSUS	6
129	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	6
130	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA POLIKLINIK POLI UMUM	KHUSUS	1
131	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOLO	KHUSUS	1
132	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA RUANG ICU	KHUSUS	4
133	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI ISOLASI TB PARU & HIV	KHUSUS	3
134	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA	KHUSUS	8
135	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU PUSTU TETA	KHUSUS	1
136	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU	KHUSUS	2
137	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI KEPERAWATAN ANAK	KHUSUS	1
138	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI	KHUSUS	6
139	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	3
140	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO	KHUSUS	5
141	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	5
142	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA INSTALASI RAWAT INAP RUANG PERAWATAN KELAS I UTAMA A	KHUSUS	2
143	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	2
144	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO	KHUSUS	3
145	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA IGD.NEW	KHUSUS	3
146	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BELO	KHUSUS	3
147	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	3
148	Perawat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO	KHUSUS	1
149	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	7
150	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA PUSTU NTOKE	KHUSUS	1

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
151	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI RAWAT INAP KELAS 1	KHUSUS	4
152	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI KEPERAWATAN ANAK	KHUSUS	2
153	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE PUSTU POJA	KHUSUS	1
154	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO PUSTU KANCA	KHUSUS	1
155	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA PUSTU CAMPA	KHUSUS	1
156	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA PUSTU NUNGGI	KHUSUS	1
157	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI PUSTU WADUKOPA	KHUSUS	1
158	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA SIMPASAI	KHUSUS	1
159	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE PUSTU BAJO PULO	KHUSUS	1
160	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI PUSTU MAWU	KHUSUS	1
161	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO	KHUSUS	4
162	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA	KHUSUS	5
163	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU PUSTU KUTA	KHUSUS	1
164	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO PUSTU LERE	KHUSUS	1
165	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU PUSTU MANGGE	KHUSUS	1
166	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE PUSTU JIA	KHUSUS	1
167	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU PUSTU HIDIRASA	KHUSUS	1
168	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI PUSTU SAMPUNGU	KHUSUS	1
169	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU	KHUSUS	8
170	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA PUSTU NANGAWERA	KHUSUS	1
171	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA PUSTU KAWINDA NAE	KHUSUS	1
172	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI PUSTU NIPA	KHUSUS	1
173	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO DESA RIAMAU	KHUSUS	1
174	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA PUSTU MANDALA	KHUSUS	1
175	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI PUSTU RITE	KHUSUS	1
176	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA PUSTU BALA	KHUSUS	1
177	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	9
178	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE PUSTU SARI	KHUSUS	1
179	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	6
180	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI PUSTU TALAPITI	KHUSUS	1
181	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE PUSTU PARANGINA	KHUSUS	1
182	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	3
183	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE PUSTU LAMERA	KHUSUS	1
184	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI PUSTU SAI	KHUSUS	1
185	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR PUSTU DESA TALOKO	KHUSUS	1
186	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOLO	KHUSUS	1
187	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA PUSTU WORO	KHUSUS	1
188	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU	KHUSUS	3
189	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALIBELO	KHUSUS	7
190	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR PUSTU DESA SANDUE	KHUSUS	1
191	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU	KHUSUS	7
192	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU PUSTU LAMBU	KHUSUS	1
193	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	3
194	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU PUSTU KABORO	KHUSUS	1

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
195	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU PUSTU SUMI	KHUSUS	1
196	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA IGD.NEW	KHUSUS	4
197	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR PUSTU DESA BORO	KHUSUS	1
198	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE PUSTU KOWO	KHUSUS	1
199	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU PUSTU NGGELU	KHUSUS	1
200	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BELO	KHUSUS	5
201	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU PUSTU LANTA BARAT	KHUSUS	1
202	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI	KHUSUS	5
203	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI PUSTU PAI DALAM	KHUSUS	1
204	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI RAWAT INAP KELAS 2 DAN KELAS 3	KHUSUS	4
205	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR PUSTU DESA OI SARO	KHUSUS	1
206	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU PUSTU KALEO	KHUSUS	1
207	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO	KHUSUS	5
208	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO	KHUSUS	9
209	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU PUSTU KAWUWU	KHUSUS	1
210	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA PUSTU TADEWA	KHUSUS	1
211	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	3
212	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI	KHUSUS	3
213	Perawat Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA	KHUSUS	7
214	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	1
215	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU	KHUSUS	1
216	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI	KHUSUS	2
217	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	1
218	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	1
219	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
220	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI	KHUSUS	1
221	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA REKAM MEDIS	KHUSUS	4
222	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU	KHUSUS	2
223	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	3
224	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO	KHUSUS	1
225	Perekam Medis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN MEDIS	KHUSUS	5
226	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA INSTALASI LABORATORIUM	KHUSUS	3
227	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	3
228	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA	KHUSUS	1
229	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI LABORATORIUM	KHUSUS	2
230	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU	KHUSUS	3
231	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO	KHUSUS	1
232	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
233	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	3
234	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	2
235	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA INSTALASI LABORATORIUM	KHUSUS	7
236	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	2
237	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	1
238	Psikolog Klinis Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA POLIKLINIK.NEW	KHUSUS	1
239	Radiografer Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA INSTALASI RADIOLOGI	KHUSUS	3
240	Radiografer Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	1
241	Radiografer Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA INSTALASI RADIOLOGI	KHUSUS	2
242	Refraksionis Optisien Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN MEDIS	KHUSUS	2
243	Teknisi Elektromedis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA UNIT IPRS	KHUSUS	2
244	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
245	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALIBELO	KHUSUS	1
246	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	3
247	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	2
248	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	2
249	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI	KHUSUS	1
250	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BELO	KHUSUS	1
251	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE	KHUSUS	1
252	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU	KHUSUS	1
253	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO	KHUSUS	2
254	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU	KHUSUS	1
255	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA	KHUSUS	1
256	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI	KHUSUS	1
257	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO	KHUSUS	3
258	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA UNIT KESEHATAN LINGKUNGAN	KHUSUS	1

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
259	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	1
260	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	1
261	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	2
262	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI	KHUSUS	1
263	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
264	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA	KHUSUS	1
265	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA	KHUSUS	1
266	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR	KHUSUS	1
267	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO	KHUSUS	1
268	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA	KHUSUS	3
269	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU	KHUSUS	1
270	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN MEDIS	KHUSUS	3
271	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA POLIKLINIK POLI GIGI	KHUSUS	2
JUMLAH				650

III KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
1	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA	D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA / D-IV ANIMASI / D-IV DESAIN MEDIA / D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 SEJARAH / S-1 PARIWISATA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	KHUSUS	2
2	Analisis Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM	KHUSUS	2
3	Analisis Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN BIDANG MUTASI	S-1 HUKUM	KHUSUS	2
4	Analisis Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT	S-1 HUKUM	KHUSUS	1
5	Analisis Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT	S-1 HUKUM	KHUSUS	3
6	Analisis Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT	S-1 HUKUM	KHUSUS	2
7	Analisis Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN	S-1 HUKUM	KHUSUS	1
8	Analisis Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT	S-1 HUKUM	KHUSUS	2
9	Analisis Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	S-1 HUKUM	KHUSUS	2
10	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN BIDANG PENCEGAHAN SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK / S-1 REKAYASA ELEKTRO	KHUSUS	13

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
11	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN SEKSI PENGENDALIAN OPERASI, KOMUNIKASI DAN INVESTIGASI	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA BERKELANJUTAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KIMIA / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN REKAYASA / S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI / S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 REKAYASA ELEKTRO / S-1 REKAYASA FISIKA / S-1 REKAYASA KESELAMATAN / S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 REKAYASA KIMIA / S-1 REKAYASA MESIN / S-1 REKAYASA SIPIL / S-1 REKAYASA TENAGA LISTRIK	KHUSUS	7
12	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 EKONOMI / S-1 GEOGRAFI / S-1 KLIMATOLOGI / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 HUKUM	KHUSUS	3
13	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	3
14	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM	KHUSUS	2
15	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	KHUSUS	3
16	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	3
17	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3
18	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
19	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG PENGEMBANGAN POLITIK FASILITASI ORPOL / ORMAS DAN PEMILU	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
20	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 FISIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK	KHUSUS	2
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	KHUSUS	3
22	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAAN SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	S-1 AKUNTANSI	KHUSUS	2
23	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ASET SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET	D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
24	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	KHUSUS	3
25	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA LINGKUNGAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 KEBIJAKAN PANGAN / S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN	KHUSUS	4
26	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 AGRIBISNIS	KHUSUS	2
27	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV KELAUTAN / D-IV PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / S-1 PERIKANAN	KHUSUS	2
28	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	KHUSUS	2
29	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN	S-1 EKONOMI / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	KHUSUS	2
30	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BIDANG REHABILITASI, PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN	D-IV ILMU TANAH / D-IV PERTANIAN / D-IV TEKNIK PERTANIAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 ILMU TANAH / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
31	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN BIDANG KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	KHUSUS	1

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
32	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	KHUSUS	2
33	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	KHUSUS	2
34	Arsiparis Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH BIDANG KEARSIPAN	D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III AKUNTANSI / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	KHUSUS	2
35	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN	S-1 ILMU PANGAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	KHUSUS	2
36	Instruktur Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG BINA PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO	KHUSUS	3
37	Medik Veteriner Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UNIT PENUNJANG PETERNAKAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN WAWO	PROFESI DOKTER HEWAN	KHUSUS	2
38	Medik Veteriner Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UNIT PENUNJANG PETERNAKAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN LAMBU	PROFESI DOKTER HEWAN	KHUSUS	2
39	Medik Veteriner Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UNIT PENUNJANG PETERNAKAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN AMBALAWI	PROFESI DOKTER HEWAN	KHUSUS	2
40	Medik Veteriner Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UNIT PENUNJANG PETERNAKAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN KECAMATAN WERA	PROFESI DOKTER HEWAN	KHUSUS	2
41	Medik Veteriner Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN	PROFESI DOKTER HEWAN	KHUSUS	3
42	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
43	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN WAWO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WAWO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
44	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LAMBITU SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LAMBITU	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
45	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS PAYI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
46	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
47	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	4
48	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LAMBU SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LAMBU	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
49	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOHA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. WOHA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
50	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PALIBELO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. PALIBELO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
51	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS NGALI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
52	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU TIMUR LANGGUDU SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KECAMATAN LANGGUDU TIMUR	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
53	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
54	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. DONGGO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
55	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
56	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN WOHA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WOHA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
57	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
58	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
59	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
60	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN DONGGO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. DONGGO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
61	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
62	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN MADAPANGGA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. MADAPANGGA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
63	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN SAPE SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SAPE	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
64	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. TAMBORA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
65	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
66	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAAN SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
67	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
68	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN MONTA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. MONTA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
69	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. SANGGAR	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
70	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. MONTA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
71	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
72	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
73	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN SUB BIDANGPENDATAAN DAN PENDAFTARAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
74	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
75	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN BELO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BELO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
76	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
77	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
78	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
79	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. LAMBITU	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
80	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. LAMBU	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
81	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
82	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BIDANG HORTIKULTURA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
83	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
84	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
85	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. LANGGUDU	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
86	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
87	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. SAPE	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
88	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN AMBALAWI SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. AMBALAWI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
89	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. AMBALAWI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
90	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
91	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. SOROMANDI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
92	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
93	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
94	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PERHUTANAN RAKYAT, PENCEMARAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
95	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BELO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. BELO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
96	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
97	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
98	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
99	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
100	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PARADO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. PARADO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
101	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN SOROMANDI SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SOROMANDI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
102	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALIBELO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. PALIBELO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
103	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOLO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. BOLO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
104	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. WAWO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
105	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	7
106	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
107	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. PARADO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
108	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA SUB BAGIAN TATA USAHA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
109	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN BOLO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BOLO	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
110	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
111	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
112	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN WERA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WERA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
113	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
114	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
115	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
116	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN BIDANG SARANA DAN PRASARAN SEKSI PEMELIHARAAN, INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
117	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
118	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA, KECIL DAN MENENGAH	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
119	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
120	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
121	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN SANGGAR SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SANGGAR	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
122	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENGAIRAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
123	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. MADAPANGGA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
124	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. WERA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	1
125	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA SEKSI PELAYANAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
126	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN TAMBORA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. TAMBORA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
127	Paramedik Veteriner Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	KHUSUS	2
128	Paramedik Veteriner Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER	KHUSUS	2
129	Pemadam Kebakaran Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMADAM DAN PENYELAMATAN BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN SEKSI PEMADAMAN, EVAKUASI DAN INVESTIGASI	SLTA/SMA SEDERAJAT	KHUSUS	19
130	Pembina Industri Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 BIOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 FISIKA / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KIMIA / S-1 MATEMATIKA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNIK SIPIL	KHUSUS	2
131	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG CIPTA KARYA DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK SIPIL	KHUSUS	2
132	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV KELAUTAN / D-IV PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PANGAN / S-1 KELAUTAN / S-1 PERIKANAN / S-1 TEKNOLOGI	KHUSUS	2
133	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN	S-1 ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
134	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA	S-1 ARSITEKTUR / S-1 GEOLOGI / S-1 PERENCANAAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI	KHUSUS	2
135	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN	S-1 ARSITEKTUR / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL	KHUSUS	3
136	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN	SMK KONSTRUKSI GEDUNG, SANITASI DAN PERAWATAN / SMK TEKNIK GAMBAR BANGUNAN / SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN / SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	KHUSUS	2
137	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA	SMK DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN / SMK KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / SMK TEKNIK GAMBAR BANGUNAN / SMK BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI / SMK TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	KHUSUS	2
138	Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG PENGAIRAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	KHUSUS	3
139	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBU SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. LAMBU	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	1
140	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN UNIT PENUNJANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BOLO SUB BAGIAN TU UNIT PENUNJANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN BOLO	S-1 PERTANIAN	KHUSUS	2
141	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
142	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH BIDANG KEARSIPAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
143	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SOROMANDI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. SOROMANDI	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
144	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADAPANGGA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. MADAPANGGA	S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
145	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT LAMBITU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
146	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT MONTA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
147	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS INVESTIGASI	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
148	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
149	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SANGGAR SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. SANGGAR	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	1

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
150	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT MADAPANGGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
151	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PARADO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. PARADO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	1
152	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA BIDANG EKONOMI KREATIF	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
153	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3
154	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
155	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LAMBU SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LAMBU	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
156	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LANGGUDU BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LANGGUDU	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
157	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOLO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. BOLO	D-IV/S-1 EKONOMI	KHUSUS	1
158	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
159	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
160	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAYI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS PAYI	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	1
161	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAMBITU SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. LAMBITU	S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
162	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT LAMBU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
163	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERMUKIMAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
164	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT BOLO SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
165	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
166	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KERJA SAMA	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
167	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMBALAWI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. AMBALAWI	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
168	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN SUB BIDANG KAS DAERAH	S-1 SOSPOL / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	3
169	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN UNIT PENUNJANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MONTA SUB BAGIAN TU UNIT PENUNJANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MONTA	S-1 PERTANIAN	KHUSUS	2
170	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT DONGGO SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
171	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA SEKSI PELAYANAN	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
172	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WAWO SEKSI PEREKONOMIAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
173	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAAN SUB BIDANG ANALISA KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI ANGGARAN	S-1 HUKUM	KHUSUS	2
174	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	KHUSUS	3
175	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
176	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3
177	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
178	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WERA SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
179	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA SEKRETARIS SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM / S-1 ADMINISTRASI	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
180	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
181	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMBORA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. TAMBORA	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 SOSPOL / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	1
182	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT PARADO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
183	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAAN SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	KHUSUS	3
184	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM	KHUSUS	3
185	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
186	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ASET SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM	KHUSUS	2
187	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN SANGGAR SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SANGGAR	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
188	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN DONGGO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. DONGGO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
189	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PALIBELO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. PALIBELO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
190	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN SOROMANDI SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SOROMANDI	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
191	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT DONGGO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
192	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT LANGGUDU SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
193	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN WOHA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WOHA	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
194	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SOROMANDI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
195	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3
196	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN AMBALAWI SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. AMBALAWI	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
197	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG DISTRIBUSI PANGAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
198	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	KHUSUS	3
199	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
200	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DONGGO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. DONGGO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
201	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WERA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. WERA	D-IV/S-1 EKONOMI	KHUSUS	1
202	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
203	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN MADAPANGGA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. MADAPANGGA	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
204	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	3
205	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT MADAPANGGA SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
206	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT BOLO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
207	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG TATA RUANG DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
208	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN WERA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WERA	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
209	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3
210	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT PALIBELO SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
211	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3
212	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SAPE SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
213	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT BELO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
214	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
215	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SAPE SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
216	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG AGRIBISNIS	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
217	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA SEKRETARIS SUB BAGIAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	KHUSUS	3
218	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3
219	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT AMBALAWI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
220	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
221	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
222	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN TAMBORA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. TAMBORA	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
223	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ASET SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
224	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
225	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
226	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SANGGAR SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
227	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WAWO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
228	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WOHA SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
229	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN WAWO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. WAWO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
230	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PARADO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. PARADO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
231	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WOHA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. WOHA	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM	KHUSUS	1
232	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LAMBITU SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LAMBITU	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	1
233	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT BELO SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
234	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAWO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. WAWO	S-1 SOSPOL	KHUSUS	1

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
235	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
236	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	S-1 SOSPOL / S-1 ADMINISTRASI / D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	3
237	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT PALIBELO SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
238	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAD SUB BIDANG PERENCANAAN PAD	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
239	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGALI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS NGALI	S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
240	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SOROMANDI SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
241	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT LAMBU SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
242	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SUB BAGIAN PROTOKOL	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
243	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT MONTA SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
244	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MONTA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. MONTA	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
245	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
246	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
247	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	KHUSUS	3
248	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LANGGUDU SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. LANGGUDU	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
249	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
250	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
251	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT TAMBORA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
252	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN BOLO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BOLO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
253	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
254	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPE SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. SAPE	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
255	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WOHA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
256	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN MONTA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. MONTA	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
257	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
258	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BELO SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS KEC. BELO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 SOSPOL	KHUSUS	1
259	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN UNIT PENUNJANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SAPE SUB BAGIAN TU UNIT PENUNJANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN SAPE	S-1 PERTANIAN	KHUSUS	2
260	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG FASILITASI DAN PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
261	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
262	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WERA SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
263	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN SAPE SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. SAPE	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
264	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN UNIT PENUNJANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MADAPANGGA SUB BAGIAN TU UNIT PENUNJANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN MADAPANGGA	S-1 PERTANIAN	KHUSUS	2
265	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SANGGAR SEKSI PEMERINTAHAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
266	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	2
267	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT LANGGUDU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
268	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
269	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	KHUSUS	2
270	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN BELO SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. BELO	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 SOSPOL / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
271	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENCATATAN SIPIL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 SOSPOL / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	KHUSUS	3
272	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
273	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ARSITEKTUR / S-1 GEOGRAFI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK GEODESI	KHUSUS	3
274	Penata Ruang Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG TATA RUANG DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	S-1 ARSITEKTUR / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	KHUSUS	3
275	Penerjemah Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 SASTRA INGGRIS / D-IV BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL	KHUSUS	3
276	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT DONGGO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
277	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT LAMBITU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
278	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
279	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SOROMANDI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
280	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WAWO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
281	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT PALIBELO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
282	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT LANGGUDU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
283	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
284	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SAPE SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
285	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WOHA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
286	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
287	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
288	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
289	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT AMBALAWI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
290	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
291	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	4
292	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT BELO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
293	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	5

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
294	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
295	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT PARADO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
296	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN MADAPANGGA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. MADAPANGGA	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
297	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
298	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
299	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT WERA SEKRETARIS SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
300	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT MADAPANGGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
301	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
302	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
303	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT MONTA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
304	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
305	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	4
306	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT SANGGAR SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
307	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
308	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT LAMBU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
309	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT BOLO SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
310	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
311	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
312	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
313	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
314	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
315	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KANTOR CAMAT TAMBORA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
316	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	3
317	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	4
318	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT PENUNJANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LANGGUDU BAGIAN TATA USAHA UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KEC. LANGGUDU	SLTA SEDERAJAT	KHUSUS	2
319	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BIDANG TANAMAN PANGAN	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PERKEBUNAN / S-1 TEKNOLOGI BENIH / S-1 BIOLOGI / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 AGRONOMI	KHUSUS	2
320	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BIDANG HORTIKULTURA	S-1 TEKNOLOGI BENIH / D-IV BIOLOGI / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 AGRONOMI / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PEMULIAAN TANAMAN / S-1 PERKEBUNAN	KHUSUS	2
321	Pengawas Benih Tanaman Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BIDANG TANAMAN PANGAN	SMK PERTANIAN	KHUSUS	1
322	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
323	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN	S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN / S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 INDUSTRI PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV PENYULUH PETERNAKAN	KHUSUS	2
324	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	S-1 KIMIA	KHUSUS	1
325	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA, KECIL DAN MENENGAH	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
326	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG FASILITASI DAN PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	1
327	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN	D-IV PETERNAKAN / D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 PENYULUH PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN	KHUSUS	2
328	Pengawas Mutu Pakan Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BIDANG KESEHATAN HEWAN	SMK PETERNAKAN / SEKOLAH PETERNAKAN MENENGAH ATAS / SPP PETERNAKAN / SMK AGROBISNIS PRODUKSI TERNAK	KHUSUS	2
329	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERDAGANGAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 BIOLOGI / S-1 BISNIS / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
330	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	KHUSUS	1
331	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	D-III SEMUA JURUSAN	KHUSUS	3
332	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI / D-III PERPAJAKAN / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III EKONOMI / D-III KOMPUTER / D-III SOSIATRI	KHUSUS	2
333	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN UPT INSTALASI FARMASI SUB BAGIAN TATA USAHA UPT ISNTALASI FARMASI	D-III AKUNTANSI	KHUSUS	2
334	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH BIDANG PERPUSTAKAAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	KHUSUS	3
335	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA SUB BAGIAN TATA USAHA	D-III MANAJEMEN AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
336	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP	D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 ILMU PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN / S-1 PERIKANAN / S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	KHUSUS	2
337	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA, KECIL DAN MENENGAH	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	3
338	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN	S-1 BIOLOGI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA / S-1 FISIKA / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN / S-1 GEOLOGI / S-1 HORTIKULTURA / S-1 HUKUM / S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 ILMU KEDOKTERAN HEWAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU TANAH / S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 KEDOKTERAN HEWAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KIMIA / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 PEMULIAAN TANAMAN / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN / S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 PENGINDERAAN JAUH / S-1 PERKEBUNAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN / S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI / S-1 SANITASI LINGKUNGAN / S-1 SOSIAL / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 SOSIATRI / S-1 STATISTIKA / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEOFISIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PERMINYAKAN / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	KHUSUS	3
339	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG KETRANSMIGRASIAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM	KHUSUS	4
340	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERHUBUNGAN BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	SMA IPA / SMK TEKNIK	KHUSUS	4
341	Penguji Mutu Barang Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PENGELOLAAN PASAR	SMK TEKNIK	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
342	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM	KHUSUS	2
343	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG KEBERSIHAN, PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI / S-1 ANTROPOLOGI / S-1 BIOKIMIA / S-1 BIOKIMIA NUTRISI / S-1 BIOLOGI / S-1 BIOLOGI TERAPAN / S-1 EKOLOGI / S-1 FISILOGI / S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 KEHUTANAN / S-1 KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN / S-1 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 KIMIA / S-1 MIKROBIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI MASYARAKAT / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	KHUSUS	3
344	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 HUKUM BISNIS / S-1 HUKUM SYARIAH / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
345	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BIDANG PENYULUHAN	D-IV PENYULUH PERTANIAN / D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
346	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN WERA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
347	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN DONGGO	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
348	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN MADAPANGGA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	KHUSUS	3
349	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN LAMBU	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
350	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN WOHA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN	KHUSUS	2
351	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN SAPE	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	KHUSUS	2
352	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN SOROMANDI	S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA	KHUSUS	1
353	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN BOLO	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
354	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN AMBALAWI	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	KHUSUS	2
355	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN LANGGUDU	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	KHUSUS	2
356	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN PARADO	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN	KHUSUS	2
357	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN TAMBORA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	KHUSUS	2
358	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN BELO	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	KHUSUS	2
359	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN PALIBELO	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
360	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN SANGGAR	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PETERNAKAN	KHUSUS	2
361	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN LAMBITU	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
362	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN WAWO	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN	KHUSUS	2
363	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN MONTA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN	KHUSUS	2
364	Penyuluh Pertanian Terampil	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BALAI PENYULUH PERTANIAN WAWO	D-III AGRIBISNIS	KHUSUS	1
365	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	KHUSUS	3
366	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT	S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI	KHUSUS	1
367	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
368	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
369	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
370	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
371	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	D-IV AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	KHUSUS	1
372	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	2
373	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	KHUSUS	2
374	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
375	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
376	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	KHUSUS	1
377	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
378	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	S-1 ADMINISTRASI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
379	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI ISLAM / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMUNIKASI	KHUSUS	2
380	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA WILAYAH	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN	KHUSUS	2
381	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI	KHUSUS	2
382	Perencana Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI	KHUSUS	2
383	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DPRD BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK	KHUSUS	3
384	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KHUSUS	3

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
385	Pranata Komputer Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	KHUSUS	2
386	Pranata Komputer Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	KHUSUS	3
387	Pranata Komputer Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA RSUD BIMA SEKRETARIS SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	KHUSUS	2
388	Pranata Komputer Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH SEKRETARIAT	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	KHUSUS	2
389	Pranata Komputer Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN SUB BIDANG ADMINISTRASI GAJI	D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	KHUSUS	1
390	Pranata Komputer Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT	D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 REKAYASA ELEKTRO / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	KHUSUS	1
391	Pranata Komputer Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	KHUSUS	2
392	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	KHUSUS	5
393	PRANATA TRANTIBUM	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKSI IDENTIFIKASI, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	KHUSUS	67
394	PRANATA TRANTIBUM	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PENGAMANAN, PENGAWALAN DAN PENGAWASAN SEKSI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	KHUSUS	50
395	PRANATA TRANTIBUM	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG OPERASI DAN PENERTIBAN SEKSI PENERTIBAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	KHUSUS	100
396	Pustakawan Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH BIDANG PERPUSTAKAAN	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	KHUSUS	2
397	Statistisi Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	D-IV SAINS DATA TERAPAN / S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA / S-1 SAINS DATA SPASIAL	KHUSUS	2
398	Teknisi Akuakultur Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	SMK TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA / SMA IPA / SMK BUDIDAYA KELAUTAN / SMK AGRIBISNIS PERIKANAN	KHUSUS	2

NO	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI/UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH ALOKASI FORMASI
399	Teknisi Kesehatan Ikan Pemula	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	SMA IPA	KHUSUS	2
400	Widyabasa Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG KEBUDAYAAN	S-1 BAHASA INDONESIA / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 PENDIDIKAN BAHASA / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 SASTRA INGGRIS	KHUSUS	2
401	Widyaprada Ahli Pertama	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA BIDANG KEBUDAYAAN	S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	KHUSUS	3
JUMLAH					1117

**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
KABUPATEN BIMA TAHUN 2024,**



LAMPIRAN II

Pengumuman Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024

Nomor : 871/104/07.2/ 2024

Tanggal : 1 Oktober 2024

SURAT LAMARAN

....., 2024

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Bima Tahun 2024

Kepada
Yth. Bupati Bima
di-
Bima

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
NIK KTP :
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Lokasi Formasi/Unit Penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat e-mail aktif :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen yang diunggah pada portal SSCASN BKN sebagai berikut:

1. Pas Foto terbaru mengenakan pakaian formal dengan latar belakang merah;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL;
3. Surat Pernyataan 5 (lima) poin, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi/ditempel meterai 10.000,-;
4. Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun dibubuhi/ditempel meterai 10.000;
5. Surat Keterangan Bukti Pengalaman aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir aktif bekerja secara terus menerus dibubuhi/ditempel meterai 10.000;
6. Ijazah Asli;
7. Transkrip Nilai Asli;
8. Ijazah Profesi asli (**bagi Apoteker, Ners, Dokter dan Dokter Spesialis**);
9. Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku (**bagi pelamar formasi tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR**);
10. Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat kedisabilitas **(bagi pelamar penyandang disabilitas)**
11. Sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar (**bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik pada JF Guru**)

Demikian surat lamaran ini dibuat, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan.

Pemohon,
meterai 10.000, TTD
NAMA JELAS

LAMPIRAN III

Pengumuman Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024
Nomor : 871/104/07.2/ 2024
Tanggal : 1 Oktober 2024

SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

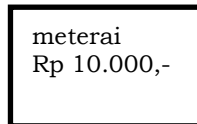
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah);
- 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, atau anggota TNI/POLRI;
- 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., **2024**

Yang membuat pernyataan



ttd

(NAMA LENGKAP)

LAMPIRAN IV

Pengumuman Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024
Nomor : 871/104/07.2/ 2024
Tanggal : 1 Oktober 2024

KOP PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN BEKERJA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Non ASN di bawah ini:

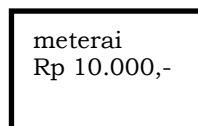
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
NIK KTP :
Unit Kerja :
Kualifikasi Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :

Adalah benar-benar Pegawai Non ASN yang terdata dan bekerja pada**(nama perangkat daerah/unit kerja)**..... dengan masa kerja selama Tahun Bulan dan **bekerja sesuai dengan jabatan yang dilamar.**

Demikian keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala resiko apabila di kemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang membuat pernyataan



ttd

(NAMA LENGKAP)

LAMPIRAN V

Pengumuman Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024
Nomor : 871/104/07.2/ 2024
Tanggal : 1 Oktober 2024

KOP PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Non ASN di bawah ini:

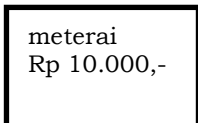
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
NIK KTP :
Unit Kerja :
Kualifikasi Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :

Adalah benar Pegawai Non ASN yang terdata dan **aktif bekerja pada(nama perangkat daerah/unit kerja).....** mulai Tanggal Bulan Tahun **sampai dengan saat ini secara terus menerus.**

Demikian keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala resiko apabila di kemudian hari terbukti keterangan saya ini tidak benar.

(nama tempat),

Yang membuat pernyataan



ttd

(NAMA LENGKAP)